



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
KOMISI I DPR RI  
KE PROPINSI MALUKU  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN SIDANG 2010 - 2011  
TANGGAL 8 – 11 NOVEMBER 2010**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
2010**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I. UMUM**

Setiap Reses Masa Persidangan, Komisi-komisi DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 huruf (f) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010 - 2011, Komisi I DPR RI telah membentuk beberapa tim kunjungan kerja dimana salah satunya adalah tim kunjungan kerja ke Propinsi Maluku. Laporan berikut adalah hasil temuan tim kunjungan kerja di Propinsi Maluku.

### **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kunjungan Kerja dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Maluku dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Propinsi Maluku yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI khususnya permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, serta komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan pemerintah dan instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam masa persidangan berikutnya.

### **III. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Maluku dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2010. Jumlah seluruh tim adalah 16 (enam belas) orang dengan komposisi keanggotaan tim yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Anggota Komisi I DPR RI dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Tenaga Ahli Komisi I DPR RI, 1 (satu) orang Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI, 1 (satu) orang Pendamping Kemhan, 1 (satu) Penghubung Kemhan dan 1 (satu) orang Penghubung Kemkominfo.

Adapun daftar nama tim kunker Komisi I DPR RI ke Propinsi Maluku secara lengkap adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGG.</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Hayono Isman, S.IP	450	F-PD	Ketua Tim
2.	Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga	556	F-PD	Anggota Tim
3.	Paula Sinjal, SH.	555	F-PD	Anggota Tim
4.	KRMT Roy Suryo Notodiprojo	505	F-PD	Anggota Tim
5.	Drs. Ramadhan Pohan, MIS	520	F-PD	Anggota Tim
6.	H. Tri Tamtomo, SH	322	F-PDIP	Anggota Tim

7.	Yoyoh Yusroh	64	F-PKS	Anggota Tim
8.	Ir. H. Azwar Abubakar, MM	101	F-PAN	Anggota Tim
9.	H. Achmad Daeng Se're, S.Sos	318	F-PPP	Anggota Tim
10.	Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, M.Si.	-	Sekretariat Komisi I DPR RI	
11.	Sugeng Riyadi	-	Sekretariat Komisi I DPR RI	
12.	Muammil Rokhily	-	Pemberitaan DPR RI	
13.	Tubagus Erif Faturrahman	-	Staf Ahli Komisi I DPR RI	
14.	Brigjen. TNI Surung Siburian	-	Pendamping Kemhan	
15.	Deden Deni Doris, SE	-	Penghubung Kemhan	
16.	Drs. Ferizal	-	Penghubung Kemkominfo	

## **BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

### **I. PROFIL PROPINSI MALUKU**

Propinsi Maluku merupakan sebuah wilayah di Bagian Timur Indonesia dengan ibu kota Ambon. Saat ini, Propinsi Maluku dipimpin oleh Karel Albert Ralahalu dan Ir. S. Assagaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Propinsi Maluku terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Populasi Maluku adalah 1,52 juta jiwa dengan orang Ambon sebagai penduduk asli. Banyak pula orang-orang dari daerah lainnya yang menetap di Maluku, misalnya orang Jawa dan orang Bugis yang datang sebagai pedagang.

Luas Propinsi Maluku adalah 712.479,7 Km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar (92,3%) merupakan wilayah lautan dan hanya 7,6% sisanya merupakan daratan yang terdiri atas 1.412 buah pulau. Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 Km<sup>2</sup>) disusul Pulau Buru (9.000 Km<sup>2</sup>), pulau Yamdena (5.085 Km<sup>2</sup>) dan Pulau Wetar (3.624 Km<sup>2</sup>). Itulah sebabnya Propinsi Maluku dikenal dengan sebutan propinsi seribu pulau. Dengan bentuk geografi seperti itu, Pemda berharap Propinsi Maluku memiliki status propinsi kepulauan sehingga dapat mengelola kekayaan dan potensi laut secara maksimal.

Bentuk geografi kepulauan membuat propinsi ini kaya dengan potensi perikanan dan habitat air lainnya. Setidaknya, potensi sumber daya perairan di Maluku dari tiga lokasi saja (Laut Banda, Laut Arafura dan Laut Seram), mencapai 457.240,6 ton pertahun. Secara keseluruhan, potensi perikanan mencapai 1.640.030 ton per tahun sehingga Maluku menjadi lumbung ikan nasional. Sayangnya, tingkat pemanfaatannya hanya 657.453 ton per tahun atau hanya 40,09%. Pemda Propinsi Maluku juga telah melakukan budi daya laut seperti rumput laut, mutiara, lobster dan lainnya yang mencapai 495.300 hektar.

Kendati luas wilayah daratan hanya 7,6% tidak berarti propinsi ini tidak memiliki potensi nabati, sebaliknya justru sangat kaya akan hasil alam. Bahkan dalam sejarah, kepulauan Maluku telah menjadi salah satu pusat perebutan konflik antar negara-negara kolonial pada masa kolonialisme untuk memperebutkan monopoli kontrol atas wilayah ini. Propinsi Maluku sangat kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Karena itu, Maluku juga disebut sebagai propinsi atau kepulauan rempah-rempah. Selain itu, daratan Maluku juga memiliki potensi lain dari hutan, galian dan pertambangan.

Disamping julukan positif tersebut di atas, propinsi ini juga memiliki julukan negatif yang menjadi stigma sosial, terutama oleh masyarakat luar Maluku yaitu sebagai propinsi yang sarat dengan kekerasan serta konflik agama dan propinsi pemberontakan. Stigma ini sangat kuat melekat sehingga berdampak besar terhadap kepariwisataan Maluku yang sebenarnya sangat unik, kaya dan indah. Persoalan pemberontakan RMS telah dimulai dari masa kemerdekaan yang disokong oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sedangkan konflik SARA telah mengoyak-koyakan wilayah ini selama kurang lebih tiga tahun sejak tahun 1999.

Konflik bernuansa SARA pada tahun 1999 yang berbarengan dengan krisis ekonomi dan finansial global telah memukul sistem sosial, budaya dan perekonomian Maluku hingga titik terendah yaitu minus 23%. Keadaan seperti ini jauh di atas rata-rata nasional yang hanya berkontraksi sebesar minus 13%.

Tidak hanya warga yang mengalami eksodus, tetapi juga para investor. Tidak ada lagi “Ambon manise”, yang ada adalah “Ambon pahite”. Semuanya serba pahit dan tragis. Kini, setahap demi setahap, persoalan sosial tersebut diperbaiki dan secara makro, kondisi perekonomian Maluku cenderung membaik setiap tahun. Salah satu indikatornya antara lain, adanya peningkatan nilai PDRB. Pada tahun 2003 PDRB Propinsi Maluku mencapai 3,7 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi 4,05 triliun tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2004 mencapai 4,05 persen dan meningkat menjadi 5,06 persen pada 2005. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Maluku telah mencapai 5,43 persen yang berarti lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,5 persen. Bahkan dari laporan triwulanan diketahui pula bahwa pelaksanaan Sail Banda yang baru saja selesai dilaksanakan telah mampu mendorong perekonomian Maluku di atas 7 persen pada pertengahan tahun 2010. Investor yang dahulu hengkangpun kemudian kembali.

Dari berbagai potensi yang dimiliki propinsi ini, terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat diandalkan untuk membangun perekonomian berbasis kerakyatan yaitu:

- Sektor Kelautan dan Perikanan, dapat dikembangkan usaha perikanan tangkap berbasis pada 12 pelabuhan perikanan yang dimiliki propinsi ini maupun perikanan budidaya Rumput Laut yang akan dikembangkan di enam klaster, serta berbagai industri perikanan potensial lainnya;
- Sektor Pertanian, dapat dikembangkan usaha industri pengolahan hasil perkebunan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala serta industri pengolahan kelapa;
- Bidang Pariwisata, Propinsi Maluku masih sangat potensial sebagai daerah pengembangan industri pariwisata karena memiliki kekayaan alam, sejarah maupun budaya yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisata. Keanekaragaman budaya Propinsi ini dikenal baik dalam bentuk *Living Culture* maupun *Monument*.

Optimisme Maluku semakin nampak dengan semakin menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Jika pada tahun 2003 tingkat kemiskinan masih sebesar 32,85% maka pada tahun 2010 telah mengalami penurunan menjadi 27,74% sedangkan tingkat pengangguran dari 14,91% pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 9,13% pada tahun 2010. Namun penurunan tersebut masih tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 13,33% untuk tingkat kemiskinan dan 7,41% untuk tingkat pengangguran pada tahun 2010.

Propinsi Maluku memiliki empat bagian perbatasan wilayah. Salah satu perbatasan yang terpenting adalah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan 2 negara, yaitu Timor Leste dan Australia. Maluku memiliki 18 pulau terluar yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk berbatasan langsung dengan 2 negara tersebut. Kabupaten di Maluku yang daerahnya berada pada wilayah perbatasan antara negara yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pulau-Pulau kecil terluar atau terdepan menjadi isu penting dan menjadi perhatian, sebab kawasan ini memiliki arti penting secara ekonomi karena dilalui jalur ALKI, politik dan pertahanan keamanan karena berhadapan langsung dengan wilayah negara tetangga. Untuk itu pengembangan pulau terluar/terdepan tersebut harus dilakukan secara terpadu dari berbagai aspek sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun menjamin pertahanan dan keamanan nasional di wilayah tersebut serta keutuhan wilayah NKRI. Namun

pembangunan di wilayah tersebut pada kenyataannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, apalagi dengan wilayah di negara tetangga.

Terkait dengan pembangunan pulau terluar, Pemerintah Daerah Propinsi Maluku mencoba menerapkan konsep pembangunan berdasar keserasian dan keseimbangan antara pendekatan Keamanan (*security approach*) dan Kesejahteraan (*prosperity approach*).

Dalam hal percepatan pembangunan ini, Pemerintah Daerah Propinsi Maluku mengharapkan dukungan penuh Komisi I DPR RI agar Pemerintah Pusat dapat segera memprioritaskan pembangunan di Maluku meliputi:

1. Pembangunan transportasi intermoda trans Maluku yang meliputi jaringan jalan trans Seram, trans Buru, trans Yamdena, trans Aru dan penanganan jalan lintas perbatasan yang dihubungkan oleh pelayanan transportasi laut dan udara, pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan, pengembangan dan pembangunan bandara udara baru di Banda, Dobo, Kisar, Saumlaki, Moa, Tepa dan Ilwaki.
2. Pembangunan prasarana dasar energi, kelistrikan terutama energi baru terbarukan mikro hidro dan PLTS, komunikasi, irigasi, air bersih, dan air minum.
3. Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), peningkatan prasarana dasar kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas, revitalisasi posyandu dan poskesdes, penyediaan dan penguatan fungsi tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan tenaga paramedis)
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kualifikasi guru untuk pemantapan program wajib belajar 9 tahun dan peningkatan Program Wajib Belajar 12 tahun.
5. Pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, melalui optimalisasi 12 pelabuhan perikanan, yakni pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pokok, fungsional dan fasilitas penunjang, bantuan unit tangkap kepada nelayan terutama di sekitar pelabuhan serta pengembangan budidaya rumput laut dan komoditas perikanan lainnya.
6. Pengembangan Maluku sebagai Provinsi Pariwisata Bahari, melalui pembangunan infrastruktur pariwisata dan pengembangan konektivitas dengan Pulau Bali dan lokasi wisata internasional lainnya.
7. Pembangunan Maluku sebagai Provinsi Rempah-rempah, dan Agroindustri Kelapa melalui pengembangan dan distribusi benih unggul peningkatan sarana prasarana pertanian, dan industri.
8. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui peningkatan akses terhadap modal serta pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.
9. Penanggulangan kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan alokasi dana penanggulangan kemiskinan serta Dana Alokasi Khusus di Maluku.

Secara umum, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Gubernur, kondisi dan dinamika sosial budaya dan perekonomian Maluku semakin membaik. Konflik bernuansa SARA tersebut kini telah usai. Demikian juga potensi sepratisme RMS maupun simpatisannya semakin memudar dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat. RMS hanya besar di media, namun tidak memiliki pengikut militan di dalam negeri. Para simpatisan yang ada bukanlah para ideolog yang paham mengenai RMS melainkan hanya masyarakat awam yang tidak mengerti dan mudah ditunggangi oleh oknum.

Mereka yang ditunggangi biasanya adalah masyarakat yang tidak memiliki tingkat kesejahteraan dan pendidikan tinggi.

Namun informasi yang disampaikan oleh Poswil BIN maupun oleh Pangdam XVI/Pattimura memberikan pandangan berbeda bahwa konflik bernuansakan SARA masih berpotensi sangat tinggi. Demikian juga peta mengenai gerakan dan simpatisan RMS masih menjadi bahaya laten yang perlu diwaspadai keberadaannya. Latar belakang dari persoalan ini adalah karena masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan. Berdasarkan data yang ada, Propinsi Maluku merupakan propinsi termiskin ke-3 di Indonesia, tetapi di sisi lain, merupakan propinsi terkorup ke-6 di Indonesia. Hal ini tentu saja sangat paradoks dan ironis.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemda Maluku, apabila potensi alam dapat dieksplorasi secara lebih maksimal dan bijak (memperhatikan kelestarian dan keserasian) maka Maluku seharusnya menjadi salah satu propinsi terkaya di Indonesia. Sebagai wilayah lumbung ikan nasional dan potensi laut lautnya, seharusnya juga masyarakat Maluku adalah masyarakat yang cerdas karena makhluk laut memiliki zat-zat atau kandungan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kecerdasan manusia.

## **II. KUNJUNGAN TERKAIT BIDANG TUGAS KOMISI I DPR RI**

### **1. BIDANG INTELIJEN (POS WIL BIN)**

Terkait bidang intelijen, tim kunker Komisi I DPR RI melakukan kunjungan ke Poswil Maluku BIN untuk mengetahui kondisi Maluku secara lebih detil dari berbagai bidang. Pertemuan ini bersifat tertutup dan rahasia, sehingga informasi yang disampaikan oleh Kaposwil Maluku BIN lebih valid. Poswil Maluku BIN merupakan perpanjangan tangan dari Badan Intelijen Negara di Propinsi Maluku sebagai pelaksana kegiatan intelijen yang memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dengan berbagai dinas, instansi, jawatan pemerintah lainnya terutama dalam mendukung pencapaian situasi daerah yang kondusif. Tema yang disampaikan oleh Kaposwil BIN Maluku adalah “Peran BIN dalam mendukung Kominda dalam upaya membangun kepedulian masyarakat melaksanakan lapor cepat”

Dalam paparannya, Kepala Poswil mengatakan bahwa secara umum, dinamika kehidupan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Keamanan di Maluku saat ini cukup dinamis. Karena itu, sikap waspada perlu tetap ditingkatkan mengingat Maluku sebagai wilayah yang pernah dilanda konflik sosial, wilayah separatistis dan juga secara geografis rawan dari berbagai tindakan pelanggaran hukum.

#### **a. Faktor Geografis**

Secara geografis, ada tiga wilayah di Maluku yang memiliki kerawanan tingkat tinggi. Pertama adalah di Pulau Wetar yang merupakan pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Pulau ini sering dijadikan wilayah penyusupan baik keluar maupun masuk ke wilayah Maluku dan menjadi pintu gerbang utama bagi para simpatisan RMS untuk melakukan infiltrasi, penggalangan atau kampanye ke luar negeri serta melakukan penyelundupan. Yang kedua dan ketiga adalah perairan di Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar yang sangat rawan bagi tindakan *illegal fishing*.

#### **b. Ideologi**

Konteks ideologi di Maluku sangat terkait dengan gerakan separatisme RMS. Jumlah simpatisan RMS di Maluku saat ini memang mengalami penurunan dan pelemahan namun tetap eksis sehingga perlu diwaspadai. Simpatisan RMS tersebar di beberapa wilayah yaitu 100 orang Kepulauan Seram, 250 di Pulau Ambon dan Saparua, serta 40 orang di Pulau Buru. Di Saumlaki juga terdeteksi adanya gerakan RMS yaitu pemasangan sebuah bendera RMS, namun belum teridentifikasi pelaku dan jumlah simpatisannya. Kelemahan dalam mewaspadai mereka membuat aparat keamanan di Maluku kecolongan seperti yang terjadi dalam peristiwa tari cakalele dimana simpatisan RMS dapat dengan mudah menerobos lapisan pengamanan presiden yang ada dan melakukan tarian cakalele di hadapan presiden dengan membawa bendera RMS. Pelaku penari cakalele tersebut sebenarnya bukanlah seorang ideolog yang paham benar akan sejarah dan maksud serta tujuan RMS. Ia hanya menjadi korban dari pimpinan RMS di luar negeri yang berupaya memeralatnya.

RMS eksis pada 15 April tiap tahun dan berupaya memanfaatkan even nasional maupun internasional. Saat ini RMS tidak solid dan bersifat klandestin. Namun demikian, RMS memiliki kemampuan melakukan penggalangan massa, propaganda, provokasi, membentuk opini, kerja sama dengan gerakan separatisme yang ada di dalam maupun luar negeri serta organisasi HAM baik nasional maupun internasional. Berdasarkan data yang ada, saat ini setidaknya ada 9 simpatisan RMS berasal Maluku yang merupakan anggota LSM kemanusiaan yang berpusat di Jakarta: Kontras.

Modus propaganda RMS adalah melalui pembuatan publikasi seperti buku, pamflet maupun selebaran. Salah satunya adalah buku berjudul "Membongkar Konspirasi Dibalik Konflik Maluku" yang ditulis oleh Samuel Waileruny yang juga berprofesi sebagai pengacara. Buku tersebut bernada provokatif dengan tujuan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat Maluku terhadap gerakan RMS. Substansi buku tersebut adalah: konflik Maluku diindikasikan sebagai konspirasi pemerintah melalui TNI/Polri sebagai upaya *genocide* terhadap orang-orang Maluku, menjadikan rakyat sebagai kekuatan penentang perjuangan RMS untuk memuluskan jawnisasi. Propaganda lainnya adalah penyebaran wall paper untuk handphone dengan motif atau gambar tertentu, seperti Gambar yang berlandaskan Benang Merah Raja (RMS) dan bertuliskan "Mena Muria", gambar tarian cakalele bertuliskan "Mena muria", bendera benang raja (RMS), gambar bendera RMS yang berkibar, gambar ikan lumba-lumba dan tulisan "Maluku My Heart" dengan *back ground* warna bendera RMS, dan gambar mata *back ground* warna bendera RMS dengan tulisan "Merdeka crew"

RMS menjadi besar karena *coverage* media atas berbagai aksi kecilnya. Apabila media tidak mem-*blow-up* berita tentang RMS, maka RMS akan tenggelam. Pembatalan Presiden SBY ke Belanda terkait adanya gerakan RMS yang mengajukan tuntutan penangkapan terhadap Presiden Indonesia dan kemudian diberitakan secara luas baik lokal, nasional maupun internasional di sisi lain memberikan dampak negatif yaitu kembali menguatnya isu RMS di Maluku, memberi kesan seakan-akan RMS memiliki jaringan, dukungan dan kekuatan besar di luar negeri. Terkait dengan pembatalan kunjungan presiden SBY tersebut, Pemerintah Kerajaan Belanda kemudian berupaya mempererat hubungan dengan merencanakan pembukaan kantor perwakilan atau Konsulat Jenderal Belanda di Maluku. Akan tetapi terkait rencana pembukaan ini, Poswil BIN Maluku belum melakukan analisa mengenai dampak positif dan negatifnya, khususnya bagi perkembangan RMS ke depan.



### **c. Politik**

Secara umum, permasalahan politik Propinsi Maluku dikelompokkan pada dua persoalan besar, yaitu pemilukada dan isu pemekaran wilayah. Saat ini terjadi wacana pemekaran propinsi di Maluku menjadi Propinsi Maluku Tenggara Raya. Wacana ini berkembang di Kab. Maluku Tenggara, Kota Tual, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya. Wacana pemekaran ini melahirkan hubungan yang sedikit tegang antara Pemda Propinsi Maluku dengan Pemda Kab/Kota yang terlibat di dalamnya sehingga sedikit banyak mengganggu kelancaran tugas. Sedangkan untuk Pemilukada, pada tahun 2010 ini diselenggarakan dua pemilukada dan juga dua pemilukada pada 2011.

### **d. Ekonomi**

Persoalan ekonomi yang sangat menonjol dan berpotensi melahirkan ketidakstabilan adalah kelangkaan sembako. Persoalan ini kerap terjadi mengingat bentuk geograif Maluku yang terdiri dari banyak kepulauan dan akses transportasi ke pulau-pulau tersebut kerap terhambat karena berbagai hal. Praktis ketika sembako langka, harga-harga di pasaranpun merangkak naik. Propinsi Maluku merupakan propinsi yang sangat mahal akan biaya hidup. Dengan naiknya harga sembako, hal tersebut semakin menekan kehidupan ekonomi masyarakat sementara penghasilan tidak bertambah, justru berkurang.

### **e. Sosial Budaya**

Ada tiga permasalahan yang menonjol dalam persoalan sosial budaya ini. Pertama, masih adanya trauma psikologis pasca konflik horizontal. Konflik bernuansa SARA selama tiga tahun telah memporak porandakan sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat Maluku. Bahkan nilai-nilai yang dahulu disakralkan, seperti sistem pela gandong yang sebelumnya sangat dihormati dan menjadi perekat sosial yang lintas etnis dan agama telah terkoyak-koyak akibat konflik yang sangat brutal. Tingginya jumlah korban jiwa dan harta benda serta luka-luka fisik dan luka sosial melahirkan penderitaan dan trauma psikologis yang sangat mendalam dan perlu waktu panjang untuk memulihkannya.

Persoalan kedua adalah sensitivitas sosial yang tinggi dan adanya segregasi penduduk. Persoalan ini masih berkaitan dengan persoalan pertama. Masyarakat Maluku mudah sekali terpancing emosinya oleh hal-hal atau peristiwa yang sumber masalah atau pelaku dan penyebabnya sangat sepele bahkan tidak jelas. Konflik horisontal menjadikan masyarakat begitu sensitif terhadap berbagai isu dan mudah meledak emosinya atau "sumbu pendek". Apabila sebuah peristiwa terjadi, masyarakat kemudian dengan mudah tersegregasi dalam dua kelompok besar: Islam dan Kristen atau antara kampung A dengan kampung B. Masyarakat Maluku belum dapat memisahkan mana konflik individu dan mana konflik kelompok. Persoalan individu selalu ditarik pada kelompok besar dan komunal, baik itu agama maupun kampung. Hal ini bukan hanya monopoli masyarakat biasa, tetapi juga kelompok terdidik, seperti mahasiswa. Peristiwa sepele perkelahian antar mahasiswa yang tidak jelas penyebabnya di Universitas Pattimura dengan cepat memilah mahasiswa menjadi kelompok mahasiswa Islam melawan kelompok mahasiswa Kristen.

Permasalahan ketiga adalah tingginya euforia penyampaian pendapat masyarakat dan mahasiswa yang kerap dilakukan dengan cara-cara anarkis.

#### **f. Pertahanan**

Propinsi Maluku memiliki banyak pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara, khususnya di bagian selatan yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Namun demikian, jumlah satuan TNI yang bertugas di bidang pertahanan sangat minim. Pulau-pulau di Kabupaten Maluku Tengah Barat yang berbatasan dengan Australia hanya dijaga oleh 1 Pos TNI AL dan 1 Kodim. Sedangkan puluhan pulau di Maluku Barat Daya, yang langsung berbatasan dengan Timor Leste dan juga Australia, dijaga oleh 1 Pos TNI AL dan 8 Koramil.

#### **g. Keamanan**

Persoalan keamanan di Maluku didominasi oleh masih banyaknya konflik horisontal (antar desa/kampung) yang terjadi di masyarakat seperti di Ambon, Piru, Tual dan Saumlaki. Persoalan lain adalah masih banyaknya peredaran senjata sisa konflik SARA baik rakitan maupun senjata oraganik TNI/Polri hasil penjarahan. Peredaran senjata api ilegal ini marak di Ambon dan Namlea. Persoalan ketiga adalah masih maraknya pencurian ikan di Maluku bagian Selatan, khususnya Kabupaten Maluku Barat Daya.

Terkait dengan peran Poswil Maluku BIN dalam mendukung Kominda dalam upaya membangun kepedulian masyarakat melaksanakan lapor cepat, Poswil BIN telah melakukan berbagai koordinasi dengan seluruh jajaran anggota Kominda: Pemda, TNI, Polri dan Kejaksaan. Upaya yang dilakukan Poswil BIN dalam melibatkan masyarakat melalui jalur formal maupun informal serta pembangunan jaringan intelijen di masyarakat yang telah diberi bekal mengenai keintelijenan secara mendasar.

Namun demikian, Kominda di Maluku kurang berjalan secara optimal karena beberapa hal:

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana, seperti anggaran dan kantor sekretariat yang belum tersedia.
2. Kondisi geografi yang berbentuk kepulauan menyulitkan komunikasi dan koordinasi
3. Adanya perbedaan penafsiran terhadap Permendagri tentang Kominda.
4. Arogansi Otonomi Daerah. Hal ini terkait dengan perbedaan penafsiran terhadap Permendagri. Akibatnya, struktur kominda di satu kabupaten/kota berbeda dengan struktur kominda di kabupaten/kota lainnya.

Agar Kominda dapat berjalan efektif, Poswil Maluku BIN berharap adanya kerjasama seluruh komponen Kominda dalam membangun kesadaran masyarakat yang sadar dan peka terhadap lingkungan. Respon positif dari DPRD, khususnya terkait anggaran, sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi peran Kominda di Kota/Kabupaten.

## **2. BIDANG PERTAHANAN**

Terkait tugas Komisi I DPR RI di bidang pertahanan, tim kunker Komisi I DPR RI ke Propinsi Maluku melakukan kunjungan dan berdialog dengan Panglima Kodam XVI/Pattimura, Komandan Lantamal IX Ambon serta Wakil Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan. Selain itu, Tim juga melakukan peninjauan ke satuan Yonif 733/Raider untuk melihat secara langsung kondisi

prajurit di lapangan, kesiapan serta perlengkapan alutsistanya serta melihat secara langsung kondisi perumahan dinas prajurit di lingkungan Kodam XVI/Pattimura dan Lantamal IX.

Terkait rumah dinas (rumdis), sebagian besar bangunan rumah dinas baik di lingkungan Kodam XVI/Pattimura maupun Lantamal IX/Ambon merupakan bangunan lama dan sudah tua. Beberapa bangunan bahkan terlihat retak karena sering terkena gempa, khususnya bangunan dengan bahan dasar tembok semen. Untuk tingkat peminan dan perwirra, rumdis terlihat sederhana namun rapi, namun untuk tingkat bintang dan tamtama, rumah dinas banyak yang tidak layak pakai dan kurang perawatan.

Mengingat bentuk geografi Provinsi Maluku yang terdiri dari banyak kepulauan, secara umum kondisi bidang pertahanan di wilayah Maluku sangat memprihatinkan baik dari segi kesejahteraan maupun dari kelengkapan dan kesiapan alutsistanya. Tugas dan tantangan bidang pertahanan di Provinsi Maluku sangat berat dan penuh dengan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap seluruh gatra kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, tetapi dukungan atas fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan kurang memadai serta tingkat kesejahteraan untuk prajurit relatif kurang. Tingginya biaya hidup di Maluku membuat banyak prajurit TNI tidak membawa serta keluarganya dan hanya pulang sesekali. Kondisi ini tentu saja secara psikologis sangat tidak baik karena konsentrasi prajurit tidak sepenuhnya tertuju kepada tugas dan tanggung jawabnya melainkan terpecah kepada persoalan rumah tangga. Karena itu, baik Kodam XVI/Pattimura, Lantamal IX maupun Lanud Pattimura semuanya mengharapkan agar mendapatkan “tunjangan kemahalan” serta penambahan perlengkapan alutsista.

Berikut adalah laporan dan hasil temuan tim kunker Komisi I DPR RI di bidang pertahanan di Provinsi Maluku:

**a. Kodam XVI / Pattimura dan Tinjauan Kesiapan Yonif 733/Raider**

Kodam XVI/Pattimura merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi provinsi Maluku dan Maluku Utara, yang membawahi 20 kota/kabupaten, 191 kecamatan dan 1.826 desa. Pangdam XVI/Pattimura yang sekarang menjabat adalah Mayor Jenderal TNI Hatta Syarifuddin.

Tugas Pokok Kodam XVI/Pattimura adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah darat Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai bagian dari NKRI yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan kodam XVI/Pattimura dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD baik yang bersifat operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

Kodam XVI/Pattimura bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan sembilan belas pulau terluar yang berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Timor Leste, Australia dan Filipina yang tersebar di Provinsi Maluku (18 pulau) dan Maluku Utara (1 pulau). Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Jiew, Pulau Arakula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batugoyang, Pulau Masela, Pulau Batarkusu, Pulau Larat, Pulau Asatubun, Pulau Selaru, Pulau Meitimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Liran

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kodam XVI/Pattimura diperkuat oleh 1 Makodam, dua Korem, 9 Kodim, 63 Koramil, 3 Yonif diperkuat, 1 Yonif Raider, 1 Denkav, dan 1 Denzipur.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kodam XVI/Pattimura adalah:

1. Tingkat kerawanan wilayah yang sangat tinggi terkait adanya 19 pulau terdepan yang ada di bawah kendali dan tanggung jawab Kodam XVI/Pattimura.
2. Tingginya kerawanan aktifitas pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing.
3. Tingginya tingkat kerawanan bagi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan angin kencang.

Dibandingkan dengan luas dan beratnya beban tugas dan tanggung jawab serta geografi yang terdiri ribuan kepulauan, maka kekuatan dan struktur organisasi Kodam XVI/Pattimura masih jauh dari kondisi ideal. Kodam XVI/Pattimura hanya memiliki 1 Denkav dan 1 Denzipur padahal tantangan di wilayah yang menjadi tanggung jawab Kodam XVI/Pattimura sangat berat. Demikian juga Kodam XVI/Pattimura hanya diperkuat oleh 1 yonif yang bersifat organik yaitu Yonif 733/Raider. Sementara 3 yonif lainnya merupakan perbantuan.

Dengan tingginya tingkat kerawanan di berbagai bidang, khususnya terkait gangguan bagi pertahanan NKRI serta ideologi separatisme RMS yang masih menjadi ancaman, struktur organisasi dan kekuatan Kodam XVI/Pattimura harus diperkuat dengan satuan tempur atau satuan bantuan tempur yang sifatnya organik dan dilengkapi dengan perlengkapan alutsista yang memadai.

Dengan kondisi seperti tersebut juga, maka Kodam XVI/Pattimura tidak siap apabila diberikan beban dan tugas untuk mendidik atau melatih masyarakat yang terkena tugas bela negara apabila seandainya nanti peraturan mengenai komponen cadangan ditetapkan.

Terkait dengan kunjungan ke Kodam XVI/Pattimura ini, tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI juga melakukan peninjauan terhadap Yonif 733/Raider dalam rangka melihat kesiapan satuan yonif baik prajurit maupun alutsistanya. Tim melakukan interaksi dan dialog langsung dengan para prajurit Yonif 733/Raider. Dalam tinjauan ini terungkap beberapa temuan khususnya terkait alutsista dimana kondisinya sangat minim dan mengkhawatirkan.

Yonif 733/Raider memiliki beberapa panser namun sebagian besar tidak dapat dioperasikan karena dalam kondisi rusak. Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa perawatan, maka akan menambah kerusakan kendaraan lebih parah. Namun demikian, perawatan tersebut terkendala minimnya anggaran. Demikian juga dengan alutsista lainnya seperti mortir yang usia pakainya telah puluhan tahun dan tingkat akurasi hanya 40%. Saat dilakukan eksersisi atau peragaan pemasangan mortir, beberapa bagian dan peralatan dari persenjataan tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga harus disiasati dengan berbagai hal. Kondisi tersebut tentu saja membahayakan prajurit dan mengganggu kelancaran tugas.

Yonif 733 Raider memiliki beberapa senjata anti tank atau SLT. Senjata tersebut nampak baru, tetapi bukan karena baru dibeli atau baru diproduksi, melainkan karena tidak pernah digunakan. Ini karena SLT hanya digunakan untuk sekali

pakai. Latihan penggunaan SLT dihindari karena biaya untuk pemenuhan senjata tersebut sangat mahal. Dari kondisi tersebut, nampak bahwa prajurit tidak pernah merasakan dan menggunakan SLT untuk latihan menembak secara langsung sehingga belum teruji kemampuan teknis perorangan dalam penggunaan senjata tersebut.

Untuk alat komunikasi, beberapa perlengkapan juga tidak dapat dioperasikan karena sudah rusak. Dalam wilayah gugus tugas dengan medan yang luas dan terdiri dari banyak kepulauan, alat komunikasi menjadi sarana yang sangat vital sehingga pemenuhannya menjadi sebuah kebutuhan mutlak. Terkait dengan senjata perorangan, persenjataannya juga telah berusia tua dan larasnya tidak lagi sesuai dengan bentuk asli karena telah aus. Ini sangat berpengaruh terhadap akurasi maupun presisi peluru yang ditembakkan. Untuk peluru atau amunisinya, setiap prajurit hanya memiliki bekal pokok sejumlah 250 dan tidak mendapatkan amunisi untuk latihan rutin lainnya.

Terkait dengan kondisi alutsista yang memprihatinkan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI memerintahkan kepada Kepala Perlengkapan dan Panglima Kodam XVI/Pattimura untuk segera mengajukan anggaran dalam rangka peningkatan perlengkapan alutsista agar seluruh prajurit Kodam XVI/Pattimura dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.

#### **b. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX Ambon**

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut – IX/Ambon atau Lantamal IX/Ambon merupakan bagian tidak terpisahkan dari TNI Angkatan Laut yang berada di bawah komando Armada RI Kawasan Timur. Tugas pokok Lantamal IX/Ambon adalah menjaga perairan meliputi perairan di Propinsi Maluku dan Maluku Utara untuk melaksanakan dukungan logistik dan administrasi unsur operasi TNI AL seperti kapal, pesawat udara dan pasukan marinir, atau yang dikenal dengan 4R, yakni replainishment, repair, rest and recreation (pembekalan, perbaikan, peristirahatan dan rekreasi). Tugas lainnya adalah melaksanakan pembinaan potensi nasional kekuatan maritim dan pembinaan teritorial matra laut, melaksanakan pembinaan operasi keamanan laut terbatas dan pelaksanaan SAR.

Secara umum, berbagai permasalahan yang ada pada Lantamal IX/Ambon adalah:

1. Sarana patroli terbatas dihadapkan dengan wilayah yang luas tidak didukung oleh perlengkapan yang memadai.
2. Jumlah personel yang kurang
3. Sarana pendukung yang belum lengkap seperti belum adanya fasilitas *docking*, *undocking*, keterbatasan fungsi pemeliharaan kapal (harkap), dan keterbatasan fungsi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (fasharkan)
4. BBM yang sangat terbatas sehingga mempengaruhi pola operasi KRI/KAL/Patkamla
5. Kesejahteraan personel yang kurang terpenuhi terkait dengan harga-harga bahan pokok yang relatif mahal dibandingkan tempat lain di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, lantamal IX, termasuk Batalyon Marinir atau Yonmarhanlan, diperkuat oleh 836 personel, baik TNI maupun PNS atau hanya 47.33% dari daftar susunan personel (DSP)-nya yang berjumlah 1766. Ini berarti saat ini, Lantamal IX masih kekurangan personel sejumlah 930 orang. Berikut adalah tabel rincian jumlah personel Lantamal IX:

KESATUAN	PA		BA		TA		PNS		KET
	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	
LANTAMAL IX	242	88	445	104	150	189	172	104	- 524
TUAL	41	12	106	21	51	39	18	14	- 130
TERNATE	41	18	113	46	87	55	16	10	- 128
YONMARHANLAN	15	10	53	26	211	100	5	0	- 148
<b>JUMLAH</b>	<b>339</b>	<b>128</b>	<b>717</b>	<b>197</b>	<b>499</b>	<b>383</b>	<b>211</b>	<b>128</b>	<b>- 930</b>

Lantamal IX membawahi dua landasan angkatan laut: di Ternate dan Tual. Luas wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab Lantamal IX sangat luas, yaitu:

- Luas wil perairan : 5.800.000 Km<sup>2</sup>.
- Luas wil Laut Ter : 3.100.000 Km<sup>2</sup>.
- Luas wil laut ZEEI : 2.700.000 Km<sup>2</sup>.
- Panjang Grs Pantai : 80.791 Km.
- Panjang Base Line : 13.179 Km.
- Jumlah Pulau : 17.499 Pulau.

Dari luas wilayah perairan tersebut, beberapa ancaman yang menonjol adalah:

1. Perompakan dan pembajakan dilakukan oleh orang atau kelompok bersenjata terhadap kapal-kapal nelayan dengan tujuan ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan makan.
2. Pencemaran di laut yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara membuang limbah pabrik di laut
3. Penyelundupan komoditas laut. Ini terjadi karena adanya perbedaan harga yang tinggi di luar negeri dan menjanjikan keuntungan dibanding menjual di dalam negeri
4. *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal nelayan asing dan berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat nelayan tradisional
5. Penyelundupan TKI ilegal yang diakibatkan oleh adanya tingkat kemiskinan dan kesenjangan kehidupan perekonomian serta upah yang lebih besar di luar negeri
6. Masih banyaknya kecelakaan lalu lintas laut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pengguna maritim dalam bernavigasi dan standarisasi peralatan keselamatan
7. Masih ada kegiatan *illegal logging* di perairan Timur Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan laut, khususnya dari tindakan pencurian ikan, Lantamal IX telah melakukan tindakan terhadap 34 kapal. Dari jumlah tersebut, 17 telah diproses dimana 16 diantaranya harus dilepaskan karena tidak cukup bukti. Sedangkan 1 kasus tengah proses tingkat banding di Mahkamah Agung. Banyaknya kapal-kapal yang ditangkap namun dilepas kembali akibat dari kurang berjalannya koordinasi antara Dinas KKP (sebagai instansi pemberi ijin pelayaran dan usaha di perairan) dengan pihak Lantamal IX. Lantamal tidak mengetahui secara persis berapa jumlah kapal yang memiliki ijin operasi legal karena KKP tidak memberikan informasi atau tembusan surat kepada Lantamal IX

Untuk menjaga luas wilayah perairan dan dalam rangka mengatasi berbagai ancaman tersebut diatas, Lantamal IX dilengkapi oleh 17 KRI/KAL/Patkamla yang tergelar di tiga lokasi, Makolantamal IX/Ambon, Lanal Ternater dan Lanal

Tual. Namun dari gelaran alutsista tersebut, hanya 8 buah (47%) saja dari KRI/KAL/Patkamla yang siap operasi. Selebihnya dalam keadaan rusak. Karena itu, secara umum, kondisi alutsista dalam rangka mendukung kesiagaan operasional maritim untuk mengamankan wilayah Nusantara Bagian Timur masih kurang memenuhi standar kebutuhan pokok. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya persediaan BBM bagi kapal-kapal yang ada serta tidak adanya fasilitas pendukung untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal

Berikut adalah rincian KRI/KAL/Patkamla yang berada di bawah Lantamal IX/Ambon:

No	Jenis Kapal	Jumlah	Sebaran	Keterangan
1.	KRI	2	1 di Makolantamal IX/Ambon	Baik
			1 di Lanal Ternate	Baik
2.	KAL	3	1 di Makolantamal IX/Ambon	Baik
			1 di Lanal Ternate	Rusak
			1 di Lanal Tual	Rusak
3.	Patkamla	12	6 di Makolantamal IX/Ambon	3 baik, 3 rusak
			5 di Lanal Ternate	1 baik, 4 rusak
			1 di lanal Tual	Baik
Jumlah		17		Siap operasi = 47%

Dengan sarana dan prasarana yang terbatas, Lantamal IX tidak dapat menjalankan tugasnya untuk melaksanakan keamanan laut secara maksimal. Untuk perairan Maluku dan ZEE dilaksanakan oleh KRI BKO Guspurlatim dan Guskamlatim. Seharusnya, dengan melihat luasnya perairan yang menjadi tanggung jawab Lantamal IX/Ambon, maka kebutuhan ideal KRI/KAL/Patkamla di Lantamal IX adalah:

- Lantamal IX Ambon : 3KRI/KAL
- Lanal Ternate : 7KRI/KAL
- Lanal Ambon : 3KRI/KAL
- TOTAL : 13KRI/KAL

Selain persoalan alutsista, Lantamal IX juga memiliki kendala dalam hal kendaraan angkut operasional yang minim dan sebagian besar rusak serta fasilitas perawatan rumah sakit dan ambulance yang kurang memadai.

Terkait dengan berbagai keterbatasan yang ada, Lantamal IX menyampaikan saran dan permohonan sebagai berikut:

1. Adanya penambahan KRI/KAL di wilayah Lantamal IX sejumlah 13 KRI/KAL
2. Adanya penambahan personel dimana saat ini Lantamal IX (diluar Yonmarhanlan) masih kekurangan 782 personel. Penambahan personel ini sangat mendesak terkait dengan ditingkatkannya Posal Morotai dan Saumlaki menjadi Lanal serta rencana penambahan KRI/KAL yang membutuhkan personel untuk mengawakinya.
3. Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan yang bertujuan memperlancar *docking* dan *undocking* kapal-kapal yang ada, peningkatan fungsi pemeliharaan kapal dan fungsi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan sehingga kapal-kapal dan seluruh alutsista yang ada dapat dipelihara dan dijaga dengan baik
4. Dukungan untuk BBM melalui percepatan SP 3M karena tingginya KRI yang masuk dan beroperasi di wilayah Lantamal IX
5. Peningkatan kesejahteraan personel, khususnya tunjangan kemahalan.

### c. Pangkalan TNI Angkatan Udara Pattimura

Pangkalan TNI Angkatan Udara Pattimura atau Lanud Pattimura merupakan bagian tidak terpisahkan dari TNI Angkatan Udara yang berada di bawah komando Koopsau II dengan tugas pokoknya adalah menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan mengoperasikan seluruh satuan dalam jajarannya, melaksanakan pembinaan potensi kedirgantaraan serta menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dimiliki oleh Lanud Pattimura:

1. Jumlah kekuatan personel, baik militer maupun PNS, adalah 123 orang atau hanya 56% dari DSP yang seharusnya, yaitu 218. Berikut adalah tabel rincian jumlah personel:

PA		BA		TA		PNS		JML	
DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL
45	31	102	39	45	37	26	16	218	123
JUMLAH / PERSENTASE : 123 (56 %)									

2. Lanud Pattimura memiliki aset tanah seluas 513,67 Ha terdiri dari:
  - a. Lapangan Terbang Namlea 179,67 Ha
  - b. Lapangan Terbang Amahai 55 Ha
  - c. Lanud Pattimura 209 Ha
  - d. Lapangan Terbang Liang 70 Ha

Dari aset-aset tanah tersebut, semuanya telah tersertifikasi kecuali aset tanah lapangan terbang Liang. Namun demikian, bukan berarti di lahan-lahan milik Lanud yang telah tersertifikasi tidak memiliki persoalan dan kendala. Di atas aset tanah milik Lanud yang telah tersertifikasi banyak berdiri bangunan-bangunan permanen milik warga sehingga berpotensi melahirkan konflik antara Lanud dengan warga masyarakat.

3. Apron yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan parkir pesawat. Idealnya, apron dapat menampung parkir 4 pesawat tempur sementara apron yang ada hanya mampu menampung 4 pesawat tempur saja dengan luas 80m x 75m
4. Tidak memiliki perlengkapan radar yang memadai sehingga banyak wilayah udara *blank spot* karena dan rawan dari kontijensi dan penyusupan musuh
5. Belum terpenuhinya fasilitas kesehatan untuk prajurit dimana pusat kesehatan yang ada hanya setingkat poliklinik dengan 1 orang dokter. Akibatnya, layanan kesehatan kepada prajurit tidak maksimal

Terkait dengan kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan Lanud Pattimura dalam mendukung MEF di wilayah Indonesia Timur dilaksanakan secara terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, Komandan Lanud Pattimura menyampaikan permohonan yang dinilai mendesak saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan restorasi terhadap apron lama yang seluas 75m x 80m
2. Penambahan luas apron menjadi 220m x 225m dan dibangun *taxi way* baru
3. Diberikan tunjangan kemahalan untuk menunjang kesejahteraan personel



### 3. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Terkait dengan bidang tugas komunikasi dan informasi, Komisi I DPR RI menerima laporan dan masukan dari 8 unsur, yaitu Dinas Kominfo Pemerintah Propinsi Maluku, TVRI, RRI, Loka, PT. Pos Indonesia, PT. Telkom, KPID Maluku, LKBN. Bidang-bidang komunikasi dan informasi yang ada di Maluku secara umum juga memprihatinkan akibat kurangnya dukungan anggaran dan perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap mereka. Berikut adalah hasil dari kunjungan tersebut:

TVRI Stasiun Maluku (dan Maluku Utara) merupakan bagian dari LPP TVRI pusat yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi TVRI pusat yang diaplikasikan secara lokal. Sebagai Propinsi yang banyak memiliki pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara asing, maka keberadaan TVRI sebagai media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan sekaligus media kontrol sosial yang dinamis sangat vital. Beberapa permasalahan yang terdapat dalam TVRI Maluku adalah:

1. Minimnya dana APBN yang diterima TVRI Maluku untuk pembuatan program, memperbaiki peralatan teknik dan pemancar. Hal ini berdampak luas dan menjadi penyebab utama bagi permasalahan-permasalahan berikutnya.
2. *Coverage area* siaran lokal TVRI Stasiun Maluku masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah operasional kerja yang meliputi Maluku dan Maluku Utara. Padahal di kedua provinsi tersebut memiliki wilayah perbatasan dengan negara tetangga dan masih banyak daerah tertinggal.
3. Bentuk topografi dan geografi Maluku dan Maluku Utara menjadi kendala bagi pembangunan pemancar sehingga terdapat banyak *blank spot area* karena tidak adanya menara pemancar TVRI sehingga TVRI Maluku baru mampu melayani sekitar 30% penduduk saja.
4. Peralatan yang dimiliki sampai saat ini sebagian besar tidak dapat dioperasikan lagi karena usia yang sudah cukup tua dan kualitas gambar dihasilkanpun sangat rendah, bahkan sebagian besar mengalami kerusakan. Perbaikan peralatan tidak dapat dilakukan karena suku cadang atau komponen sudah tidak ada lagi di pasaran.
5. TVRI Stasiun Maluku memiliki 16 Satuan Transmisi, 12 satuan tersebar di Propinsi Maluku dan 4 satuan lainnya berada di Propinsi Maluku Utara. Kondisi 16 satuan transmisi yang ada sebagian besar mengalami kerusakan bahkan ada yang sudah tidak beroperasi sama sekali. Satuan transmisi yang ada rata-rata telah beroperasi di atas 10 tahun bahkan ada yang telah beroperasi sejak tahun 1977.

Terkait dengan beberapa permasalahan tersebut di atas dan agar TVRI Stasiun Maluku dapat menjangkau seluruh penduduk Maluku, TVRI menyampaikan saran dan permohonan untuk dapat melaksanakan siaran via satelit. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena sesuai dengan karakteristik geografi serta topografi Maluku yang berkepulauan, disamping biaya yang relatif murah jika dibandingkan dengan membangun kanal baru karena tidak perlu membangun infrastruktur yang banyak.

Adapun permasalahan yang terdapat dalam LKBN Antara Maluku adalah sebagai berikut:

1. Belum memiliki wartawan/kontributor di seluruh kabupaten/kota
2. Wartawan/kontributor yang ada belum dilengkapi dengan peralatan laptop, modem, flash, internet yang memungkinkan mereka bekerja di suatu tempat

3. Terbatasnya jaringan telepon dan internet khususnya di ibukota kabupaten.

RRI Maluku merupakan bagian dari LPP RRI Pusat yang menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio di wilayah Maluku. Beberapa permasalahan yang terdapat dalam RRI Maluku adalah

1. Beberapa daerah tertentu seperti Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB) Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sampai dengan saat ini belum dapat dijangkau oleh siaran RRI Stasiun Ambon (*Blank Spot*). Padahal daerah-daerah tersebut sangat strategis karena secara geografis berbatasan dengan negara-negara tetangga.
2. Kondisi geografis Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, selain berimplikasi pada tidak terjangkaunya siaran RRI pada beberapa wilayah tertentu, juga berimplikasi pada tingginya biaya operasional dalam proses-proses peliputan dan penyiaran secara langsung dari titik-titik kegiatan atau pada sumber-sumber peliputan.
3. Sarana dan prasarana penyiaran tidak mendukung. Kondisi pemancar RRI Ambon usianya sudah tua sehingga tidak memiliki kekuatan dan daya jangkau yang memadai.
4. Dana operasional yang ada tidak memadai dalam menjawab berbagai kebutuhan operasional penyiaran.

Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Maluku dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengaturan penyiaran di Maluku baik di bidang infrastruktur maupun materi penyiaran. Dalam operasionalnya KPID Maluku mengalami berbagai kendala, antara lain :

1. Secara kelembagaan masih lemah karena masih baru terbentuk.
2. Perhatian dari Pemda terhadap KPID masih minim. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya kebutuhan anggaran dan fasilitas yang diakomodir dalam APBD maupun APBD Perubahan tahun berjalan yaitu sebesar Rp. 348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus rbu rupiah). Sebagian besar dana tersebut teralokasikan untuk honor komisioner sehingga untuk program kerja relatif tidak ada dana.
3. Gaji/honor yang masih sangat minim dan bervariasi antara tiap daerah.
4. Banyaknya regulasi penyiaran yang sering berubah-ubah baik yang dikeluarkan Menkominfo maupun KPI sehingga butuh sosialisasi secara berkesinambungan dan terus-menerus kepada lembaga penyiaran.
5. Masih banyak lembaga penyiaran yang apatis dengan kehadiran UU 32/2002 dan bersikap acuh tak acuh dengan proses perizinan maupun P3-SPS yang dikeluarkan oleh KPI.
6. Tidak memiliki gedung pekantoran yang representatif. Saat ini KPID menempati gedung bekas gudang milik Pemprop Maluku seluas 5 x 8m. Tidak terdapat ruang pimpinan, ruang sekretariat, ruang rapat dan ruang monitoring.
7. Tidak memiliki kendaraan operasional
8. Tidak memiliki peralatan dan ruang monitoring isi siaran televisi dan radio

Loka Monitor Maluku adalah Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, pembinaan teknis administrasi dibawah koordinasi Sekretariat Ditjen Postel dan Pembinaan Teknis

Operasional dibawah koordinasi Direktorat Spektrum Frekuensi Radio. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitor, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, pancaran orbit satelit, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Berikut adalah beberapa kendala dan tantangan yang terdapat dalam Loka Maluku.

1. Sumber Daya Manusia. Dibandingkan dengan beban dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya serta jangkauan luas wilayah, jumlah PNS Loka Maluku saat ini sangat terbatas dan belum memadai
2. Sarana Prasana:
  - a. Peralatan monitoring Loka Monitor Ambon saat ini sudah berusia diatas 15 tahun sehingga dari sisi keakuratannya sudah terbatas.
  - b. Peralatan yang rusak sulit untuk diperbaiki karena tidak tersediaannya suku cadang di UPT.
  - c. Hampir seluruh peralatan monitoring yang dimiliki oleh Loka Monitor Ambon terintegrasi di dalam 4 unit Mobil Monitoring, sehingga untuk pelaksanaan tugas diluar pulau Ambon mengalami kesulitan karena tidak dapat dijangkau dengan Mobil Unit Monitoring.
3. Tidak lancarnya sarana transportasi laut dan udara sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Loka Monitor Ambon di Kabupaten, Kecamatan dan pulau-pulau terpencil lainnya.
4. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat belum diimbangi dengan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang ada, baik dari segi jumlah, mutu, kemampuan, wawasan dan performensnya.
5. Tingkat kritisisme masyarakat yang semakin tinggi dan cenderung bertindak melanggar aturan yang dianggap bertentangan dengan pendapatnya.

PT. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh negara dan publik. Total saham yang dimiliki PT Telkom adalah 20,159,999,280 lembar saham. 52.47% dari total saham dimiliki oleh negara dan sisanya oleh publik. Kontribusi Telkom kepada pemerintah pertahunnya sangat besar. Saat ini Telkom tidak hanya bergrak dalam bidang telekomunikasi saja (Fixed Wireline, Fixed Wireless, Cellular, Broadband Access, Satellite), tetapi juga merambah pada sektor Informasi (IT services), media (TV berbayar) dan edutainment (portal, e-commerce, content).

Khusus untuk wilayah Maluku, PT. Telkom telah berupaya melakukan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Maluku dalam program Maluku Propinsi Cyber yang sedang dalam proses pengerjaan. Dengan Polda Maluku, Telkom melaksanakan kerjasama bagi penyediaan Astinet, VPN IP dan CCTV. Di dunia pendidikan dan akademi, PT. Telkom menyediakan jaringan pendidikan nasional, aplikasi SIAP *online*, *School-Net*, dan *Teacher-Net* serta melakukan kerjasama dengan Univeristas Pattimura dalam hal penyediaan Astinet.

Terkait dengan apa yang telah dilakukan, PT. Telkom berharap agar:

1. Dukungan Pemda untuk memperlancar pembangunan infrastruktur ICT di daerah, seperti Kemudahan pemberian izin dan pembebasan lahan.
2. Kesesuaian aturan Perda dengan Undang Undang seperti Pengenaan Retribusi; penanaman tiang telepon, galian kabel, instalasi kabel laut oleh Pemda yang tidak sesuai UU No. 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (dihilangkannya pajak ganda).

Beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi oleh PT. Pos Indonesia di adalah:

1. Luas jangkauan wilayah layanan Maluku adalah 712.479,7 Km<sup>2</sup> dengan sebaran yang tidak merata, banyak terdapat pulau-pulau kecil terluar dan letaknya terpencil di pedalaman serta terisolasi dan infrastruktur terbatas, sering padam listrik, rawan bencana, menyulitkan operasional dan biaya tinggi sehingga layanan menjadi terhambat.
2. Belum semua masyarakat di Maluku belum menikmati jasa layanan pos terutama daerah-daerah pemekaran.
3. Pemerintah, sebagai mitra kerja PT. Pos, belum secara maksimal memanfaatkan jasa PT.Pos
4. Adanya persaingan layanan jasa di bidang pos semakin kompetitif.
5. Perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat mengurangi peran-peran yang dahulu dilakukan oleh PT. Pos.
6. Terbatasnya sumber daya manusia, dimana PT. Pos di Maluku hanya berjumlah 157 orang.

Dengan berbagai kendala dan tantangan tersebut, PT. Pos Indonesia di Maluku berharap:

1. Peran serta pemerintah untuk menunjang layanan jasa pos yang diselenggarakan di Provinsi Maluku, sehingga kelancaran, keberhasilan, dan pengembangan layanan jasa pos di Maluku dapat terjamin dan dapat memberikan dukungan secara optimal kepada Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.
2. Fasilitas layanan yang tersedia dapat memberikan layanan yang bermutu tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa pos.
3. Jangkauan layanan dapat diperluas sampai ke pedesaan dan daerah terpencil di Provinsi Maluku
4. Masyarakat semakin memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan layanan jasa pos.

Dinas Kominfo Pemprop mengakui persoalan-persoalan tersebut di atas namun menolak apabila dianggap tidak memiliki perhatian atau mengabaikannya. Dinas Kominfo Pemprop Maluku telah berupaya membangun kerjasama dengan berbagai *stakeholders* di bidang kominfo agar layanannya dapat dinikmati secara baik oleh masyarakat. Namun demikian, mahalnya pembiayaan dalam pembangunan bidang kominfo memerlukan adanya kesabaran dan pentahapan.

Terkait dengan bidang telekomunikasi, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI melakukan tinjauan langsung ke tiga lokasi:

1. Molluca TV. Stasiun TV ini merupakan salah satu TV lokal di Propinsi Maluku. Kepemilikan TV ini bersifat *share* dengan masyarakat. Izin penyelenggaraan penyiaran masih bersifat sementara.
2. Radio Duta Musik Serasi (DMS). DMS merupakan satu-satunya stasiun penyiaran di Maluku yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran tetap.
3. Kantor KPID Maluku. Dalam kesempatan ini Ketua Tim Kunkuer Komisi I DPR RI berkesempatan langsung meninjau kantor KPID yang dinilai tidak representatif untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

### **BAB III**

## **SARAN, REKOMENDASI DAN PENUTUP**

#### **I. SARAN DAN REKOMENDASI TINGKAT LANJUT**

Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Maluku, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan kondisi geografis Maluku yang berada di atas lempeng Pasifik, lempeng India-Australia dan lempeng Eurasia yang menyebabkan wilayah ini menjadi salah satu yang sangat labil dan rawan bencana gempa. Dalam satu hari, Maluku bisa dilanda gempa bumi sebanyak 10 kali. Namun karena posisi kedalaman jarak gempa begitu jauh, dampak gempa relatif tidak terasakan. Akan tetapi, hal tersebut perlu segera diantisipasi dan diwaspadai agar apabila suatu saat terjadi gempa besar yang disertai gelombang tsunami, warga dapat dievakuasi secepat mungkin sehingga dapat meminimalisir jumlah korban. Karena itu, pendidikan akan bencana alam harus segera disosialisasikan kepada masyarakat secara dini. Demikian juga kelengkapan mengenai sarana dan fasilitas evakuasi bencana alam serta alarm bagi terjadinya bencana tsunami harus segera dipenuhi dan dipelihara agar tidak rusak atau hilang.
2. Pemanfaatan secara maksimal 12 pelabuhan yang ada agar tidak terbengkalai dan mampu menjadi pusat dan penggerak kegiatan ekonomi rakyat sekitarnya.
3. Dalam membangun rumah dinas, agar diperhatikan model bangunan yang disesuaikan dengan kondisi alam Maluku yang sering mengalami gempa. Guna mengeliminir jumlah korban apabila suatu saat terjadi gempa besar, maka bangunan yang didirikan sebaiknya bangunan yang ramah gempa.
4. Terkait dengan masih adanya perkembangan ideologi dan simpatisan separatisme RMS, agar tetap mewaspadai gerakannya dan dilakukan tindakan tegas terhadap para simpatisan maupun pendukungnya namun dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan bukan pendekatan keamanan.
5. Terkait bidang pertahanan, Tim Kunker Komisi I DPR RI mendesak agar seluruh mitra kerja di bidang pertahanan segera mengajukan kebutuhan-kebutuhan mendesak terkait alutsista dan anggaran untuk dapat menjaga dan mempertahankan seluruh wilayah yang ada di Maluku, khususnya pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.
6. Selain alutsista, bidang-bidang pertahanan diminta segera menyampaikan kebutuhan jumlah personel bagi seluruh satuan sehingga sesuai atau mendekati jumlah berdasarkan DSP serta mengajukan kenaikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup serta biaya tinggi di Maluku seperti “tunjangan kemahalan”
7. Maluku memiliki spesifikasi wilayah yang khas dan unik dibanding dengan wilayah lain. Karena itu, dalam mengajukan berbagai kebutuhan, harus memperhatikan kesesuaian alat dengan medan dan alam agar alat yang ada dapat dipergunakan secara optimal sesuai dengan kondisi geografi Maluku.
8. Untuk memperkuat keamanan dalam pencegahan *illegal fishing* maupun penyalahgunaan ijin usaha pelayaran, Lantamal IX agar melakukan koordinasi dengan KKP mengenai jumlah dan nama-nama kapal yang memiliki ijin operasi dan usaha di perairan Maluku sehingga Lantamal tidak melakukan salah tangkap atau terhindar dari upaya pemalsuan dokumen oleh oknum-oknum tertentu.

9. Guna mengatasi persoalan kerusakan di tengah laut dan kekurangan BBM bagi KRI/KAL/Patkamla Lantamal IX, harus memiliki dok apung yang berfungsi sebagai stasiun pengisian bahan bakar dan dapat mendukung perbaikan kapal di tengah laut.
10. Lantamal IX/Ambon agar dilengkapi kapal perang (KRI) sejenis Landing Ship Tank (LST) yang siap digerakkan untuk membantu penanggulangan bencana alam, setiap saat diperlukan.
11. Pasukan Marinir yang menduduki pulau-pulau terpencil agar dilengkapi dengan alat komunikasi standar yang *compatible* dengan alat komunikasi TNI AD dan AU.
12. Lantamal IX Ambon agar membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Gugus Tempur Laut (Guspurla), Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Polri, dan masyarakat nelayan dalam rangka meningkatkan kegiatan Pembinaan Potensi Nasional Kekuatan Maritim (Binpotnaskuatmar).
13. Dalam menyelesaikan konflik tanah antara Lanud Pattimura dengan masyarakat, baik individu maupun ulayat, agar Lanud mengedepankan pendekatan humanis dan tidak provokatif sehingga dapat menghindari konflik mengingat kondisi masyarakat Maluku yang saat ini masih sensitif dan mudah terpancing emosinya untuk melaksanakan tindakan kekerasan.
14. Terkait bidang Kominfo, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI mendesak agar Pemerintah Daerah Propinsi Maluku memperhatikan berbagai kebutuhan mendesak mitra yang bergerak di bidang kominfo karena bidang ini sangat vital sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah serta mempererat persatuan dan kesatuan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan wilayah perbatasan.
15. Komisi I DPR RI akan mendesak Kementerian Kominfo untuk lebih memperhatikan mitra-mitra Komisi I di daerah, khususnya pulau terluar dan perbatasan, agar mendapatkan dukungan anggaran, sarana serta prasarana yang memadai sehingga NKRI dapat terjaga persatuannya.

## **II. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Maluku dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010 - 2011. Kami berharap hasil kunjungan kerja tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi sidang-sidang Komisi I DPR RI selanjutnya serta Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

**KETUA**

**ttd**

**H. HAYONO ISMAN, S.IP  
A.450**